

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang sudah tidak asing didengar dalam ranah hubungan internasional. Praktik pemberian bantuan luar negeri dengan struktur dan ruang lingkup yang ada sekarang, mulai dipraktikkan sejak implementasi program bantuan *Marshall Plan* yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II (Williams, 2023). Saat ini, Amerika Serikat dikenal menjadi salah satu negara pemberi bantuan luar negeri atau disebut juga negara donor, yang terbesar di dunia. Menurut data dari OECD (*Organization for Economic Development*), total bantuan luar negeri *Official Development Assistance* Amerika Serikat tahun 2022 mencapai 55.3 miliar USD dan menempati urutan paling atas negara donor dengan volume bantuan terbesar di dunia (OECD, 2023).

Dewasa ini, volume bantuan luar negeri Amerika Serikat cukup banyak dialokasikan kepada negara-negara di wilayah Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Hal tersebut dilihat dari data OECD yang menyatakan pada tahun 2021, lebih dari separuh total bruto bantuan bilateral ODA Amerika Serikat diberikan kepada negara yang berada di ketiga wilayah tersebut yakni, 14.2 juta USD (36.5%) ke wilayah Afrika, 4.3 juta USD (11.1%) Asia dan 3.9 juta USD (10.1%) Timur Tengah (OECD, 2023). Di wilayah Asia sendiri, salah satu kawasan yang menjadi penerima

bantuan luar negeri Amerika Serikat adalah sub regional Asia Tenggara tepatnya di kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong. Kawasan ini sendiri mencakup beberapa negara diantaranya Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong memiliki sejarah hubungan yang dinamis. Pendekatan Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan ini pada masa pasca Perang Dingin dikarakteristikan dengan lemahnya upaya untuk menjalin keterlibatan hubungan (Ha, 2023). Pada masa pemerintahan Presiden Bush, Amerika Serikat semakin disibukkan dengan fokus global ‘*War on Terror*’. Fokus ini membuat wilayah Asia Tenggara, terutama kawasan *mainland* yang dianggap sebagai wilayah yang tidak banyak terjadi tindak terorisme, bergeser dari fokus utama radar strategis Amerika Serikat (Ha, 2023).

Melihat hal tersebut, kebijakan Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri yang ditujukan ke kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong ini menjadi salah satu fenomena baru dalam waktu dekade terakhir, yang menunjukkan peningkatan kembali keterlibatan Amerika Serikat di wilayah sub regional tersebut. Peningkatan keterlibatan Amerika Serikat pertama kali mendapat momentum pada masa kepemimpinan Presiden Obama yang mengusung strategi ‘*Rebalancing Asia-Pacific*’ untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negerinya (Ha, 2023). Sehingga pada tahun 2009, Amerika Serikat membentuk program bantuan luar negeri *Lower Mekong Initiative* (LMI) yang dialokasikan untuk negara-negara wilayah Lembah Bawah Sungai Mekong.

Kemudian berlanjut di tahun 2020, Amerika Serikat membentuk program baru *Mekong-US Partnership* (MUSP) untuk menggantikan inisiatif program bantuan *Lower Mekong Initiative* sebelumnya (US Mission to ASEAN, 2020). Berdasarkan informasi pada halaman *web* resmi *Mekong-US Partnership*, program ini merupakan sebuah ekspansi dari program bantuan luar negeri sebelumnya agar menjadi lebih strategis, lebih terfokus, dan efektif. Tujuan utama dari program baru ini adalah untuk menciptakan kerjasama sub wilayah yang terintegrasi antara negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam dengan dukungan dari Amerika Serikat. Pada 2021, MUSP resmi mengadopsi rencana *three-year plan of action* yang mendukung pendekatan kolaboratif terhadap tantangan dan peluang regional (Mekong-US Partnership, 2021).

Pada program bantuan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah memberikan total jumlah bantuan sebesar 120 juta USD untuk program-program *Lower Mekong Initiative* selama tahun 2009 hingga 2020 (East-West Center, 2020). Sementara, pada program kerjasama bantuan luar negeri baru *Mekong-US Partnership*, Amerika Serikat mengalokasikan sejumlah bantuan yang termasuk dana senilai 52 juta USD untuk menangani isu darurat kesehatan COVID 19, bantuan pendanaan senilai 33 juta USD untuk mendukung kemajuan sistem energi di Asia Tenggara, dan beberapa rencana lainnya (USAID, 2020). Jumlah bantuan luar negeri yang dibagikan Amerika Serikat dalam angka yang besar ini menjadi satu isu menarik tersendiri untuk diteliti.

Adapun beberapa studi yang sebelumnya telah dilakukan terkait topik penelitian ini yakni, pertama adalah artikel jurnal berjudul “Institusionalisasi

Kerjasama Amerika Serikat – Negara Lembah Bawah Melalui Pembentukan *Lower Mekong Initiative* 2009-2013” oleh Jovita Aditya Putri. Pada penelitian tersebut, Putri menjabarkan pembahasan mengenai inisiasi pembentukan program kerjasama bantuan luar negeri *Lower Mekong Initiative* oleh Amerika Serikat dan dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut kepada negara-negara anggota kerjasama dalam program tersebut.

Studi kedua yang penulis temukan yakni, penelitian skripsi yang berjudul “Motif Jepang dalam *Japan-Mekong Partnership Program* di *Mekong River Basin Countries* (MRBCs) Tahun 2007-2012” oleh Rizha Putra Kusuma. Dalam penelitian ini, Kusuma menganalisis mengenai motif-motif utama yang mendorong Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri kepada kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong menggunakan variabel motif yang dirumuskan oleh Maria Andersson (2009). Dari analisisnya, Kusuma menemukan motif *humanitarian*, *economic*, *identity*, dan *environment* sebagai motif dominan yang mendorong Jepang untuk memberikan bantuan ke negara kawasan Sungai Mekong.

Dari serangkaian fakta dan tinjauan singkat pada studi terdahulu yang telah dijelaskan tadi, penulis melihat adanya *gap* penelitian yakni, dimana belum terdapat penelitian yang membahas secara eksplanatif mengenai motif Amerika Serikat pada penyaluran bantuan luar negeri terhadap negara Lembah Bawah Sungai Mekong. Maka dari itu, di sini penulis kemudian berminat untuk meneliti lebih lanjut terkait “Motif Amerika Serikat dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri ke Negara Lembah Bawah Sungai Mekong melalui *Mekong-US Partnership 2020-2023*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan terkait bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada negara di wilayah Sungai Mekong melalui program *Mekong-US Partnership* di atas, maka kemudian penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi topik utama penelitian ini yakni sebagai berikut, “apa saja motif yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam pemberian bantuan luar negeri ke negara Lembah Bawah Sungai Mekong pada program *Mekong-US Partnership* 2020-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum yakni, untuk memenuhi persyaratan atau tahapan akhir pada program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan dan menganalisis motif yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam pemberian bantuan luar negeri ke negara-negara kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong melalui program *Mekong-US Partnership*.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang sudah tidak asing lagi didengar dalam dinamika hubungan internasional. Bantuan luar negeri dewasa ini dapat didefinisikan sebagai sebuah transfer sumber daya (*capital, goods, services*) yang dilakukan secara sukarela oleh suatu negara sebagai negara donor kepada negara lain atau disebut negara *recipient* (Zhukova, 2020). Berbagai definisi mengenai bantuan luar negeri juga telah banyak dikemukakan dalam studi Hubungan Internasional terdahulu.

Menurut Holsti dalam bukunya "*International Politics: Framework of Analysis*", bantuan luar negeri merupakan aktivitas menyerahkan bantuan yang dapat berupa uang, teknologi, ataupun bantuan teknis oleh suatu negara donor kepada negara *recipient* (Holsti, 1988). Definisi lain disampaikan oleh Riddell (Riddell, 2007) juga cukup serupa, dimana ia menjelaskan bahwa bantuan luar negeri adalah suatu sumber daya (*physical goods, skills dan technical know-how, financial grants, atau loans*) yang diberikan oleh donor kepada *recipient*. Dalam definisinya, Riddell juga menyampaikan bantuan luar negeri dapat ditujukan untuk menangani isu kemanusiaan, pembangunan, dan kemiskinan namun di saat yang sama juga sebagai pendukung kepentingan politik dan strategis milik donor, *recipient*, ataupun keduanya.

Dalam konteks *foreign policy*, bantuan luar negeri dideskripsikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh negara atau pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya (Apodaca, 2017). Bantuan luar negeri

seringkali digunakan untuk mendorong kepentingan geostrategis yakni untuk membangun dan menjaga basis luar negeri, memperkuat hubungan aliansi, dan atau menjaga aliansi yang telah terbentuk. Bantuan luar negeri memfasilitasi kerjasama, dan membantu dalam membentuk aliansi yang kuat. Menurut Apodaca, Bantuan luar negeri sebagai instrumen *foreign policy* diberikan kepada negara *recipient* sebagai suatu *reward* atas tindakan tertentu atau sebagai bujukan untuk mengubah perilaku. Sehingga dapat dikatakan pemberian bantuan luar negeri adalah umpan ‘*carrot*’ yang mempengaruhi pilihan kebijakan negara *recipient* atau tindakan lainnya (Apodaca, 2017).

1.4.2 Aid Allocation Motive

Dalam perkembangannya, bantuan luar negeri tak lagi dilihat hanya sebagai kebijakan yang berorientasi terhadap pemberian bantuan semata kepada negara penerima, tapi berkembang sebagai relasi strategis untuk mencapai kepentingan milik negara donor (Feis, 1964). Maria Anderson menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan luar negeri akan selalu dibarengi dengan motif tertentu dari negara donor (Andersson, 2009). Dalam tulisannya, Andersson memformulasikan suatu skema motif atas tindakan pemberian bantuan luar negeri berdasarkan pada studi yang ia lakukan terhadap penelitian oleh penteor sebelumnya yakni, Schraeder, Hook dan Talor (1998), Sogge (2002), dan Berthelemy (2005, 2006).

Motif yang ditemukan oleh Andersson mencakup enam macam motif diantaranya yakni, *humanitarian motive*, *economical motive*, *strategic motive*, *ideology motive*, *identity motive*, dan *environment motive*. Pada masing-masing motif tersebut, terdapat indikator-indikator signifikan yang berfungsi sebagai

sarana untuk memudahkan analisis sistematis terhadap motif dari suatu tindakan penyaluran bantuan luar negeri.

Gambar 1. 1 Skema Motif dan Indikator motif teori *Aid Allocation Motives*

Motive indicators	Motives					
	Humanitarian	Economical	Strategic	Ideology	Identity	Environment
Reducing poverty		Trade	Bonding	Politics	Experience and Knowledge	Aid for a better environment
Showing compassion		Investment	Embassies	Values	Political Aims	International responsibility
		Export	Security Alliances	Democracy	International recognition	
			Peace and Security	Human Rights		

Sumber: Andersson, Maria. 2009. *Motives Behind the Allocation of Aid – A case Study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation*. Goteborgs Universitet.

Andersson melihat *humanitarian motive* pada bantuan luar negeri lewat dua indikator yakni, *reducing poverty* dan *showing compassion*. Indikator *reducing poverty* berhubungan dengan usaha negara donor guna membantu mengurangi jumlah kemiskinan di negara *recipient*. Sedangkan, indikator *showing compassion* yakni, berkaitan dengan usaha negara donor dalam menunjukkan kepeduliannya atas orang-orang dalam kesusahan karena bencana alam dan atau korban perang di wilayah negara *recipient*.

Berikutnya, *economical motive* yang dianggap sebagai motif yang banyak berpengaruh dalam bantuan luar negeri. Dalam mengidentifikasi motif ini, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan antara lain indikator *trade*, *investment*, dan *export*. Indikator *trade* berhubungan dengan usaha negara donor untuk membantu meningkatkan partisipasi perdagangan negara *recipient* dalam pasar internasional

serta benefit yang didapatkan bagi hubungan perdagangan negara donor dan negara *recipient* (Andersson, 2009).

Indikator *investment* adalah indikator yang berkaitan dengan usaha negara donor untuk dapat menempatkan investasi di negara *recipient*. Investasi ini tak hanya semata menguntungkan negara donor saja, namun juga memberikan manfaat bagi negara *recipient* seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonominya (Andersson, 2009). Indikator terakhir yakni, *export*. Indikator ini dapat dipahami sebagai usaha negara donor untuk dapat melakukan ekspor ke negara *recipient*.

Strategic motive terbagi menjadi empat indikator diantaranya, indikator *bonding*, *embassies*, *security alliances*, dan *peace and security*. Indikator *bonding* dapat dipahami sebagai usaha negara donor untuk membangun ikatan yang lebih dekat dengan negara *recipient*. Indikator selanjutnya yakni, indikator *embassies* yakni berkaitan dengan adanya kedutaan besar atau konsulat jendral negara donor yang dibuka di wilayah negara penerima. Kemudian, indikator *security alliances* dapat diamati pada partisipasi dalam kerjasama militer bersama antara negara donor dengan negara *recipient*. Indikator keempat yakni, *peace and security* yang dapat dipahami dengan kaitan usaha negara donor berpartisipasi terhadap perdamaian dunia dan keamanan internasional.

Motif keempat yakni *ideology motive*, diinterpretasikan oleh Andersson sebagai upaya negara donor untuk membagikan nilai (*values*) dan pendirian politik ke negara donor. Motif ini dilihat lewat empat indikator antara lain indikator *politics*, *values*, *democracy*, dan *human rights*. Indikator *politics* dapat

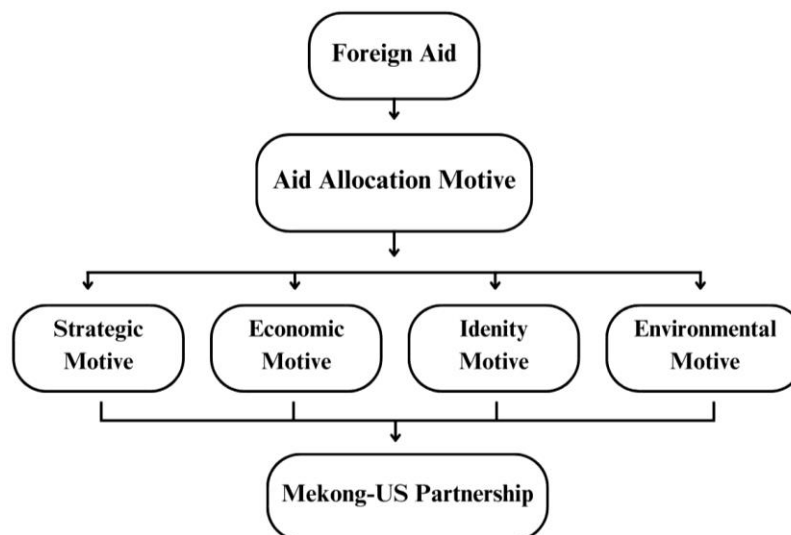
diasosiasikan dengan usaha negara donor mempengaruhi ideologi negara penerima agar menjadi lebih terbuka dan demokratis. Indikator *values* sendiri dijelaskan Maria sebagai usaha agar membuat negara penerima mengadopsi nilai (*value*) yang sama dengan negara donor, seperti nilai HAM dan anti-korupsi. Hal itu bertujuan supaya bantuan yang diberikan efektif. Selanjutnya, indikator *democracy* diartikan bahwa negara donor berusaha mendukung berkembangnya demokrasi di negara *recipient*. Hal itu karena demokrasi menjadi satu hal fundamental pada upaya pengurangan kemiskinan dan pencegahan perang (Andersson, 2009). Terakhir, indikator *human rights* yang terkait dengan bantuan luar negeri sebagai alat guna memajukan kepatuhan HAM oleh negara donor terhadap negara *recipient*.

Motif berikutnya yakni *identity motive*, yang dapat diidentifikasi lewat tiga indikator yakni, indikator *experience and knowledge*, *political aims*, dan *international recognition*. Sesuai dengan penjelasan Andersson, motif ini dipahami sebagai upaya negara donor untuk mencapai suatu identitas atau *image* tertentu di mata negara *recipient* ataupun internasional. Indikator *experience and knowledge* dapat diamati pada cara negara donor berupaya menunjukkan pengalaman dan pengetahuannya dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Indikator *political aims* terkait dengan kepentingan politik dan kebijakan luar negeri yang hendak dicapai oleh negara donor lewat tindakan penyaluran bantuan luar negeri. Dan terakhir, Indikator *international recognition* berkaitan dengan usaha negara donor guna mendapat pengakuan secara internasional melalui tindakan penyaluran bantuan luar negeri.

Motif terakhir adalah *environmental motive*. Menurut Andersson, motif ini tergolong baru pada teori motif bantuan luar negeri yang muncul seiring dengan meningkatnya pertanyaan urgensi mengenai lingkungan di seluruh dunia. Pada motif ini terdapat dua indikator yakni mencakup indikator *aid for a better environment* dan indikator *international responsibility*. *Aid for a better environment* dapat dikaitkan dengan usaha negara donor bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan lingkungan atau menciptakan lingkungan yang berkualitas di wilayah negara *recipient*. Sedangkan, indikator *international responsibility* berkaitan dengan tanggung jawab internasional terhadap lingkungan yang dilakukan oleh negara donor sebagai bagian dari komunitas internasional dunia.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Sesuai dengan poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya, kemudian terbentuk sistematika pemikiran sebagai berikut. Di ranah hubungan internasional, kita mengetahui adanya eksistensi bantuan luar negeri (*foreign aid*). Aktivitas pemberian bantuan tersebut oleh negara donor tidak hanya berorientasi terhadap penyaluran bantuan semata, namun kini berkembang menjadi relasi strategis untuk mencapai kepentingan milik negara donor. Maka dari itu, dalam suatu kebijakan pemberian bantuan luar negeri akan dibarengi oleh motif-motif tujuan tertentu oleh negara donor. Dari sejumlah motif bantuan luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, negara Amerika Serikat sebagai negara donor memiliki kepentingan terkait dengan motif *strategic*, *economic*, *identity*, dan *environmental* di kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong.

Empat motif ini menjadi motif yang dominan mendorong tindakan pemberian bantuan Amerika Serikat dari pendalaman penulis dengan sebab berikut. *Strategic motive* diidentifikasi dengan upaya Amerika Serikat untuk membangun hubungan strategis bilateral dan maupun multilateral yang lebih erat, *identity motive* terkait upaya Amerika Serikat untuk menunjukkan identitasnya sebagai negara donor yang berpengaruh terutama di kawasan tersebut, dan *environmental* pada upaya Amerika Serikat untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di bumi. Sehingga kemudian, latar belakang motif tersebut mendorong pembentukan program kerjasama bantuan luar negeri *Mekong-US Partnership* sebagai upaya untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat dalam konteks negara donor.

1.6 Argumen Utama

Pada studi penelitian ini, penulis berpendapat bahwa pemberian bantuan luar negeri pada program *Mekong-US Partnership* sesuai dengan teori *Aid Allocation Motive* dilatarbelakangi oleh tiga motif utama yakni, *strategic motive*, *economic motive*, *identity motive*, dan *environmental motive*. *Strategic motive* yang melatarbelakangi pemberian bantuan ini dilihat dari komitmen Amerika Serikat untuk meningkatkan ikatan hubungan dengan negara kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong melalui kerjasama kerjasama penyaluran bantuan dan partisipasi Amerika Serikat dalam mengatasi permasalahan keamanan non tradisional seperti *health security* dan *human trafficking* melalui program *Mekong-US Partnership Track 1.5 Policy Dialogues*. Kemudian, *economic motive* dilihat pada upaya Amerika Serikat dalam mendukung peningkatan partisipasi dan perekonomian kawasan Mekong Bawah dengan meningkatkan fasilitas maupun kualitas sumber daya manusia sehingga menciptakan pertumbuhan perdagangan dan iklim investasi yang lebih baik. Sementara itu, *identity motive* dilihat pada upaya Amerika Serikat dalam menunjukkan kredibilitasnya sebagai negara donor yang berpengalaman pada penyaluran bantuan luar negeri dan menampakkan identitas sebagai negara donor yang berpengaruh di kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong disamping eksistensi negara donor besar lain, yakni Cina di kawasan tersebut. Terakhir, *Environmental motive* dapat dilihat pada komitmen Amerika Serikat dalam mengatasi permasalahan dan ancaman lingkungan melalui sejumlah proyek kerjasama terkait energi, perlindungan lingkungan, serta manajemen air seperti

program *Foundations for Strategic Lower Mekong Hydropower and Water Resources and Management*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Dimana penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang bermaksud untuk menguraikan suatu fenomena dengan melihat penyebab terjadinya hal tersebut melalui hubungan antara dua atau lebih variabel (Silalahi, 2009). Kemudian, peneliti menggunakan suatu teori untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan motif yang melatarbelakangi tindakan penyaluran bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat. Untuk menjelaskan mengenai fenomena tersebut, penulis menggunakan teori *Aid Allocation Motive* untuk melakukan analisis terhadap bantuan Amerika Serikat kepada negara di kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong melalui program *Mekong-US Partnership*.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil batasan jangkauan penelitian tahun 2020-2023. Batas jangkauan tersebut didasarkan pada latar belakang dimana tahun 2020 merupakan momentum dimana program *Mekong-US Partnership* dibentuk yang mana menjadi bentuk ekspansi dari program bantuan sebelumnya. Sedangkan tahun 2023 dipilih karena menjadi batasan tahun pada rencana *three-year plan of action* dari program *Mekong-US Partnership* yakni, periode 2021-2023. Adapun

wilayah yang menjadi batasan penelitian untuk kasus ini adalah kawasan Lembah Bawah Sungai Mekong yang merupakan *recipient* pada program bantuan Amerika Serikat *Mekong-US Partnership*. Wilayah ini terdiri dari beberapa negara kawasan *Mainland Southeast Asia* yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ialah data yang berasal dari sumber sekunder atau sumber tidak langsung antara lain berasal dari orang lain, dokumentasi, dan literatur yang digunakan untuk mendukung suatu penelitian (Sugiyono, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka literatur yang bersumber dari baik dari literatur buku, dokumen resmi pemerintah, berita media massa, artikel jurnal, serta berbagai data bersifat kredibel di internet yang memuat materi mengenai dan mendukung topik penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis data penelitian yang disajikan dan dibahas dalam bentuk kata-kata atau secara kualitatif guna menjelaskan fenomena dalam penelitian sehingga mampu membuktikan hipotesis dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini, penulis melakukan analisis terhadap sumber data penelitian yang berupa data kualitatif guna menemukan jawaban dari rumusan masalah dan/atau membuktikan argumen utama dengan menggunakan teori terkait.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki susunan empat bab dengan sistematika pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Memuat pendahuluan yang terdiri dari poin latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

BAB II Memuat penjelasan terkait gambaran umum mengenai bantuan luar negeri Amerika ke negara-negara Lembah Bawah Sungai Mekong termasuk mengenai program bantuan luar negeri *Mekong-US Partnership* dan analisis mengenai *strategic motive* pemberian bantuan luar negeri *Mekong-US Partnership*.

BAB III Memuat analisis penelitian yang menjelaskan mengenai motif kepentingan Amerika Serikat pada pemberian bantuan luar negeri terkait dengan *economic motive*, *identity motive* dan *environmental motive* *Mekong-US Partnership* dengan menggunakan kerangka pemikiran teori *Aid Allocation Motive*.

BAB IV Bab terakhir memuat penutup yang berisikan kesimpulan serta saran atas pembahasan hasil penelitian tentang motif pemberian bantuan luar negeri Amerika Serikat pada program *Mekong-US Partnership*.